



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v3i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Fenomena Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia: Tantangan Pembangunan Sumber Daya Manusia di Era Modern

Us'an Us'an¹, Unaimah Sanaya²

¹Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia, usanazim75@gmail.com

²Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia, unasanaya@gmail.com

Corresponding Author: usanazim75@gmail.com¹

Abstract: *Unemployment and poverty are socioeconomic problems that remain serious challenges in Indonesia, particularly amidst increasingly sophisticated technological developments. Unequal economic growth, low quality human resources, and a mismatch between education and job market needs are the main factors exacerbating these conditions. This article aims to analyze the phenomenon of unemployment and poverty in Indonesia and examine the challenges of human resource development in the face of change. The method used in this research is a literature review by reviewing data from the Central Statistics Agency (BPS), official government reports, and various research findings relevant to this study. Based on the results, it was found that unemployment, especially among young people and vocational high school graduates, contributes to the increasing poverty rate. Furthermore, poverty is multidimensional and influenced by structural, economic, educational factors, and low labor productivity. Therefore, integrated and sustainable policies are needed through improving the quality of education, strengthening workforce skills, empowering small businesses, and collaboration between the government, universities, and the industrial world.*

Keywords: *Unemployment, Poverty, Human Resources, Government Policy*

Abstrak: Pengangguran dan kemiskinan merupakan permasalahan sosial ekonomi yang hingga kini masih menjadi tantangan serius di Indonesia, khususnya di tengah perkembangan teknologi yang semakin canggih. Ketimpangan pertumbuhan ekonomi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja menjadi faktor utama yang memperparah kondisi tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pengangguran dan kemiskinan di Indonesia serta menelaah tantangan pembangunan sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan mengkaji data dari Badan Pusat Statistik (BPS), laporan resmi pemerintah, serta berbagai hasil penelitian yang relevan dengan kajian ini. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengangguran, khususnya pada kelompok usia muda dan lulusan pendidikan menengah kejuruan, memiliki kontribusi terhadap meningkatnya angka kemiskinan. Selain itu, kemiskinan bersifat multidimensi dipengaruhi oleh faktor struktural, ekonomi, pendidikan, serta rendahnya produktivitas tenaga

kerja. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pendidikan, penguatan keterampilan tenaga kerja, pemberdayaan usaha kecil, serta kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia industri.

Kata Kunci: Pengangguran, Kemiskinan, Sumber Daya Manusia, Kebijakan Pemerintah

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan yang kita hadapi sampai sekarang ini adalah banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia. Pengangguran bisa disebut dengan suatu keadaan di mana seseorang tergolong dalam suatu angkatan belum bekerja namun sedang mencari pekerjaan, penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau sudah mendapatkan pekerjaan namun belum memulai bekerja. Jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar dengan kepadatan penduduk yang tidak merata di mana 60 persen terpusat di pulau Jawa, menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan juga tidak merata. Pulau Jawa hampir memiliki semua yang dibutuhkan sehingga banyak masyarakat yang tertarik bagi penduduk diluar pulau untuk mencoba peruntungan di Pulau Jawa (Asep Fikri Nur Arif & Nurwati, 2022). Pada akhirnya inilah yang menimbulkan terjadinya pengangguran, karena jumlah angkatan kerja yang terus meningkat setiap tahunnya. Permasalahan perihal pengangguran memang sangat kompleks dan merupakan isu penting yang harus diselesaikan bersama. Pengangguran dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Salah satu yang mempengaruhinya adalah faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi negara bersangkutan, tingkat inflasi, kemiskinan, serta besaran upah yang berlaku (Diah Kumala Sari et al., 2025). Apabila pada suatu negara pertumbuhan ekonominya mengalami kenaikan akan berpengaruh pada penurunan jumlah pengangguran yang diikuti dengan tingkat upah. Jika tingkat upah naik akan berpengaruh pada penurunan jumlah pengangguran pula. Sedangkan tingkat inflasi yang tinggi akan berpengaruh pada kenaikan jumlah pengangguran (Arif Novriansyah 2018). Persoalan pengangguran ini sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia, sejak masa sebelum krisis ekonomi tahun 1998 pun persoalan antara kesenjangan angkatan kerja dengan peluang kerja sudah terjadi.

Hanya saja pada masa ini persoalannya bertambah pelik. Pada saat yang sama terjadi kelesuan investasi dan ekonomi secara keseluruhan. Rendahnya daya beli masyarakat juga menyebabkan rendahnya permintaan yang berarti pula mengendurkan aktivitas produksi dalam negeri. Mengendurnya aktivitas produksi bukan hanya menjadikan semakin terbatasnya peluang kerja, melainkan juga memaksa banyak unit usaha untuk mengurangi pekerjaannya yang implikasinya terjadi PHK masal. Secara umum, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pengangguran antara lain: (1) Besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja, (2) rendahnya tingkat pertumbuhan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja, (3) Struktur lapangan kerja tidak seimbang, (4) Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga kerja terdidik dan penyediaan tenaga kerja terdidik tidak seimbang, (5) Meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan kerja, (6) Penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang (Lisa Marini & Putri, 2019).

Apalagi di era sekarang yang disebut dengan 4.0 di mana tenaga manusia sudah banyak diganti oleh mesin atau teknologi, menyebabkan menambah jumlah pengangguran di dunia. Diduga bahwa dampak dari revolusi industri 4.0 akan menyebabkan 50 juta orang akan kehilangan pekerjaannya atau hampir separuh dari total angkatan kerja di Indonesia dan ini terjadi karena tenaga kerja Indonesia masih rentan terhadap perkembangan teknologi (Tri Widayati et al., 2021). Salah satu alasan pengangguran ini tidak boleh dibiarkan adalah

kerugian pada diri sendiri dan orang lain. Bayangkan tidak sedikit masyarakat melakukan tindakan kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, pembegalan, dan sebagainya sebab pengangguran, sehingga bisa disebutkan pengangguran ini bukan saja merugikan diri sendiri, melainkan juga orang lain.

Berkenaan dengan jumlah pengangguran di Indonesia, pada tahun 2024 Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan meskipun jumlah pengangguran terendah sejak era reformasi atau 1997, namun jumlah pengangguran tahun ini mencapai 7,2 juta jiwa. Badan Pusat Statistik juga melaporkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang dimanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2024 tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,82 persen. Hal ini menunjukkan dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 5 orang penganggur. Berdasarkan jender, pada Februari 2024 pengangguran terbuka laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan sebesar 4,96 persen, sementara pengangguran terbuka perempuan yang sebesar 4,60 persen. Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, pengangguran terbuka perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan pedesaan sebesar 5,89 persen, sementara pengangguran terbuka di daerah perdesaan sebesar 3,37 persen.

Berdasarkan kelompok umur, pada Februari 2024, pengangguran terbuka penduduk kelompok umur muda antara usia (15–24 tahun) merupakan pengangguran terbuka tertinggi yaitu mencapai 16,42 persen. Sementara itu, pengangguran terbuka penduduk kelompok umur tua (60 tahun ke atas) merupakan yang paling rendah sebesar 1,14 persen. Berdasarkan pendidikan yang ditamatkan oleh angkatan kerja, pengangguran terbuka pada Februari 2024 mempunyai pola yang hampir sama dengan Februari tahun 2023. Pengangguran terbuka tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya sebesar 8,62 persen. Sementara itu, pengangguran terbuka yang paling rendah adalah pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah sebesar 2,38 persen. Apabila dibandingkan Februari tahun 2023, penurunan pengangguran terbuka terjadi pada hampir semua tingkat pendidikan, dengan penurunan terbesar pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu sebesar 1,13 persen poin. Sementara itu, lulusan Diploma IV, S1, S2, S3 mengalami kenaikan pengangguran terbuka yakni sebesar 0,11 persen poin (Laporan BPS 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang berfokus pada penelusuran, pengumpulan, dan analisis sumber-sumber tertulis yang relevan dengan fokus kajian. Penelitian kepustakaan memiliki ciri utama berupa penguraian secara sistematis, dilanjutkan dengan pemberian pemahaman dan penjelasan analitis terhadap data yang menjadi objek deskripsi (Us'an Us'an, Dandy Yusuf Alfasyah, 2026). Sementara teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, dengan menghimpun berbagai sumber yang berkaitan langsung dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan hermeneutika, yaitu metode penafsiran teks yang bertujuan untuk memahami makna, konteks, dan relevansi konsep-konsep pembelajaran secara mendalam. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa referensi yang secara langsung membahas objek permasalahan penelitian, yaitu fenomena pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Sementara, data sekunder meliputi berbagai sumber pendukung berupa buku, artikel jurnal ilmiah, disertasi, serta dokumen akademik lainnya yang relevan dengan kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengangguran Faktor Utama Penyebab Kemiskinan

Masalah kemiskinan yang terjadi saat ini di negara kita, tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya jumlah pengangguran. Sebagaimana telah disebutkan pada masa krisis ekonomi saat ini bukan hanya laju pertumbuhan angkatan kerja baru yang tidak bisa diserap oleh pasar tenaga kerja, melainkan juga terjadi pemutusan hubungan kerja sektor formal yang berakibat bertambahnya angkatan kerja yang menganggur. Oleh karena itu dalam konteks kebijakan pasar kerja, peran pemerintah diperlukan sebagai upaya dan tanggung jawab negara dalam menekan angka pengangguran (Anwar Sanusi, Fadillah Putra et al., 2024). Berdasarkan pemberitaan kompas.com kementerian ketenagakerjaan (kemenaker) hampir 53.000 tenaga kerja sudah menjadi korban pemutusan hubungan kerja sepanjang Januari-September 2024. Pada bulan September, tercatat ada tambahan jumlah korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 6.753 orang. Sehingga apabila digabung sejak Januari maka total yang menjadi korban PHK menjadi 52.933 orang. Dalam kondisi seperti inilah maka tenaga kerja banyak yang memasuki tenaga kerja informal, termasuk di antaranya sektor pertanian yang pendapatannya relatif rendah, sehingga menambah pula penduduk yang masuk kategori miskin (Idris, 2024).

Kemiskinan menjadi permasalahan yang sangat serius saat ini, bukan saja di Indonesia melainkan di seluruh dunia. Berbicara tentang kemiskinan berawal dari seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan dan keterampilan yang tersedia. Kemiskinan umumnya ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja (Hikmah, Lisa Quraisy, Hidayah, 2016). Kemiskinan disebabkan adanya faktor penghambat yang mencegah seseorang dalam memanfaatkan kesempatan dirinya. Faktor penghambat tersebut secara umum meliputi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yaitu faktor yang datang dari luar kemampuan orang yang bersangkutan, antara lain adalah birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat menghambat seseorang dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Kemiskinan model ini sering kali diistilahkan dengan kemiskinan struktural. Sedangkan faktor internal datang dari dalam diri orang miskin itu sendiri, seperti rendahnya pendidikan atau adanya hambatan budaya yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi akses orang miskin terhadap sumber daya yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraannya.

Teori kemiskinan budaya (*cultural poverty*) yang dikemukakan Oscar Lewis menjelaskan bahwa kemiskinan dapat muncul dari dalam diri orang miskin itu sendiri, sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja, dan lain-lain (Huraerah, 2013). Secara umum Kemiskinan dapat dibagi antara lain: 1) Kemiskinan Absolut yaitu apabila memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, 2) Kemiskinan Relatif yaitu kebutuhan dasarnya lebih terpenuhi, namun masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya, 3) Kemiskinan Kultural apabila individu atau kelompok tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain maupun ada peluang, dengan kata lain individu atau kelompok tersebut miskin karena sikapnya sendiri (Yuwarman Mansur, 2024). Data Badan Pusat Statistik merilis jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 23,85 juta orang, menurun 1,37 juta orang terhadap Maret 2024. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2025 sebesar 6,73 persen, naik dibandingkan September 2024 yang sebesar 6,66 persen. Sementara, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2025 sebesar 11,03 persen, menurun dibandingkan September 2024 yang sebesar 11,34 persen (Badan Pusat Statistik, 2025).

Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan kemiskinan, sebenarnya tidak sulit mencari penyebabnya, namun dari faktor tersebut sangat sulit memastikan mana yang merupakan penyebab utama serta yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap terjadinya kemiskinan. Dalam hal ini, yang paling sering dikatakan salah satu penyebab kemiskinan tingkat pendidikan seseorang yang rendah. Sekarang ini seorang hanya dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) sangat sulit mendapatkan pekerjaan, apalagi di sektor era modern ini. Namun yang menjadi pertanyaannya apakah tingkat pendidikan yang rendah sebagai penyebab utama dari kemiskinan? Apabila banyak orang di Indonesia hanya berpendidikan Sekolah Dasar oleh karena orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, maka jelas penyebab sebenarnya adalah masalah biaya atau lebih tepatnya disebabkan oleh kemiskinan. Meskipun tingkat pendidikan yang rendah sebagai titik awal permasalahan, namun apabila dipertanyakan apakah karena pendidikannya rendah menjadikan seseorang miskin? Kalau diuraikan faktor yang menyebabkan kemiskinan satu per satu, baik secara langsung ataupun tidak langsung sebenarnya cukup banyak, mulai distribusi pendapatan, kesempatan kerja, investasi, alokasi serta kualitas sumber daya alam, ketersediaan fasilitas, jenis dan tingkat pendidikan, kondisi fisik dan alam di suatu wilayah, etos kerja dan motivasi kerja, kultur budaya atau tradisi, hingga politik, bencana alam, peperangan, dan sebagainya (Nehen, 2012).

Sedangkan untuk menganalisis fenomena kemiskinan dalam negara berkembang seperti Indonesia, pertama hal ini dilihat pada kondisi sosial produktivitas masyarakatnya. Apabila melihat kondisi di Indonesia, tingkat produktivitas masyarakat cukup rendah, hal ini diperkuat dengan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berbanding lurus dengan rendahnya tingkat dan kualitas pendidikan, sehingga tidak mempunyai nilai jual dan berdaya saing di ranah nasional ataupun global (Riska Gustiana, Taufik Hidayat, 2022). Berdasarkan pemahaman tersebut, maka kemiskinan dapat menjadi penentu dan faktor dominan yang mempengaruhi persoalan kemanusiaan seperti keterbelakangan, kebodohan, ketelantaran, kriminalitas, kekerasan, perdagangan manusia, buta huruf, putus sekolah, anak jalanan, pekerja anak. Dengan demikian kemiskinan tidak bisa hanya dipandang dari satu sisi rendahnya pendapatan tetapi harus dari banyak aspek yang saling terkait sehingga bersifat multidimensi. Untuk mencari jalan keluar kemiskinan ini, pemerintah perlu memahami sebab musababnya dan menelusuri akar permasalahannya. Jika akar permasalahannya sudah ditemukan, maka langkah yang perlu diambil pemerintah adalah segera mengatasinya dengan berbagai kebijakan-kebijakan. Misalnya kemiskinan yang diakibatkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan, atau karena faktor-faktor lain, maka pemerintah perlu memfasilitasinya.

Dampak yang Terjadinya Akibat Kemiskinan

Kemiskinan dikatakan sebagai permasalahan sosial, karena mempunyai dampak yang langsung pada diri orang miskin maupun pada orang lain. Dampak yang ditimbulkan akibat kemiskinan sangat banyak, mulai dari tindakan kriminalitas, kurangnya kesehatan, putus sekolah, dan lain sebagainya. Maka di bawah ini dijelaskan secara umum beberapa dampak kemiskinan. Dampak pertama yang diakibatkan oleh kemiskinan adalah tindakan kriminalitas (kejahatan). Kesulitan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terkadang mengakibatkan dirinya lupa, sehingga tidak lagi peduli tentang halal atau haramnya sesuatu barang (Ilahi, 2014) (Us'a, Jenjang Waldiono, 2025). Bisa dilihat kasus yang terjadi saat ini, banyak yang menjadi korban amukan masa akibat kriminal yang dilakukan. Misalnya, kasus yang terjadi di Kecamatan Medan Polonia, Sumatera Utara. Seorang pria yang bernama Atek diamuk masa setelah ketahuan mencuri beras dengan ukuran karung lima kilogram. Pria malang tersebut kesakitan, bahkan pelipisnya berdarah akibat luka pukulan warga. Lelaki itu mengaku ia nekat melakukan hal tersebut, karena mengalami kelaparan. "Aku terpaksa

mencuri beras karena tidak tahan menahan rasa kelaparan. Tidak ada lagi beras apalagi ikan di rumah. Bantuan beras dari pemerintah sebanyak 5 kilogram memang ada. Tapi beras itu sudah saya kasih kepada istri untuk bisa dikonsumsi bersama anak kami,” ujarnya.

Kejahatan akibat kemiskinan juga terjadi di wilayah Kecamatan Talango yang dilakukan oleh masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka atau keluarganya. Berdasarkan hasil penelitian Yayuk Sugiarti disimpulkan bahwa beberapa pelaku kejahatan di wilayah Talango yang dilatarbelakangi oleh kemiskinan antara lain yaitu: (1) inisial ST seorang laki-laki yang berasal dari keluarga dengan mata pencaharian sebagai buruh tani garam, ST seorang kepala keluarga melakukan pencurian *tape recorder* dan peralatan elektronik lainnya, (2) inisial NN seorang laki-laki berasal dari keluarga pengangkut barang di pasar (kuli). NN seorang kepala keluarga mencuri uang di pasar tempat dia bekerja, (3) inisial WR seorang laki-laki berasal dari keluarga dengan mata pencaharian petani. WR seorang buruh tani yang hidup dengan istri dan seorang anak melakukan kejahatan pencurian uang tetangganya, inisial I seorang laki-laki yang berasal dari keluarga dengan mata pencaharian sebagai nelayan. (I) melakukan kejahatan pencurian ayam bekisar (Yayuk Sugiarti, 2014). Selain tingkat kejahatan yang semakin tinggi, kemiskinan juga berdampak terhadap keberlangsungan hidup seseorang. Banyak masyarakat yang meninggal dunia akibat kelaparan yang dialaminya. Beberapa tahun yang lalu, tiga warga di pedalaman Pulau Seram di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku dilaporkan meninggal dunia akibat busung lapar. Sementara, ratusan jiwa penduduk yang lain mengalami kelaparan parah.

Bencana kelaparan ini menyebabkan sejumlah warga terserang busung lapar hingga sebagian akhirnya tewas. Kasus kematian sejumlah warga akibat kelaparan sebetulnya bukan hal yang baru. Sebelumnya kasus yang lebih parah juga pernah terjadi di Kabupaten Asmat, Papua. Di kabupaten ini dilaporkan sedikitnya 60 warga meninggal gara-gara kekurangan gizi kronis dan serangan penyakit campak (Suyanto, 2018). Kemiskinan juga bisa berdampak kepada tingkat kesehatan seseorang. Biasanya kesehatan ini akan sulit didapatkan oleh orang-orang miskin karena kurangnya biaya untuk berobat ke rumah sakit. Sehingga jika sewaktu-waktu mereka dilanda suatu musibah atau penyakit, secara otomatis membuat mereka akan mengalami kesulitan untuk menjaga kesehatannya. Apalagi kalau biaya pengobatan yang mahal seperti di klinik-klinik atau di rumah sakit yang tidak dapat dijangkau pembiayaannya oleh masyarakat miskin (Adisty Wismani Putri, Budhi Wibhawa, 2015). Seperti yang dialami Reski Aldani anak sulung dari pasangan Adam dan Hasni warga kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat harus tertahan di rumah sakit karena orang tuanya tidak mampu melunasi biaya pengobatan dan perawatan. Orang tuanya tergolong kurang mampu, tidak bisa melunasi biaya rumah sakit anaknya sekitar Rp 6,1 juta. Sebelumnya, Reski harus menjalani operasi usai mengalami kebocoran di kepalanya akibat terjatuh saat bermain (Umar, 2020).

Upaya Pemerintah dalam Mencegah Pengangguran

Dalam kondisi sulitnya dana di tanah air, masalah efisiensi dana perlu mendapatkan perhatian. Jika diamati, ternyata unit-unit usaha rakyat, usaha kecil, merupakan sektor yang dapat menciptakan peluang kerja dengan biaya murah jika dibandingkan usaha menengah dan besar, usaha kecil hanya membutuhkan dana sedikit untuk setiap kesempatan kerja baru yang diciptakan. Hal ini memberikan gambaran bahwa alokasi dana ke unit usaha kecil yang lebih besar akan sangat menolong penciptaan kesempatan kerja tersebut. Pemerintah dalam upaya menurunkan tingginya tingkat kemiskinan melalui program pengentasan kemiskinan seperti diberlakukannya program berbasis perlindungan sosial. Namun program penuntasan kemiskinan tersebut umumnya hanya sementara, artinya program tersebut akan berjalan selama masih ada anggaran atau dana, setelah dana habis maka selesai pula kegiatan program (Ramlawati, 2022). Tampaknya dalam merumuskan sebuah kebijakan maupun

program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia perlu dilakukan beberapa tahapan kegiatan. Misalnya, diawali dengan *assesment*, kemudian analisis kebutuhan dan potensi yang dapat dikembangkan, dan merumuskan bentuk-bentuk program yang diinginkan oleh penduduk miskin.

Berkenaan dengan hal ini Suhasil Nazara, mencoba merumuskan bagaimana tahapan-tahapan dalam merumuskan kebijakan. *Tahap pertama*, melakukan diagnosis dan analisis tentang kemiskinan. Pada tahap ini dilakukan kegiatan melakukan pengukuran tingkat kemiskinan, penargetan dan penentuan jenis kebijakan atau program yang ingin dibuat. *Tahap kedua*, menentukan tujuan, target dan indikator yang ingin dicapai. Kemudian tahap *ketiga*, merancang dan mengimplementasikan program yang dibuat. Pada saat akan menjalankan program harus dimulai dengan kegiatan sosialisasi program pada tahap awal, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan monitoring selama program berlangsung, dan diakhiri dengan kegiatan evaluasi saat program berakhir. Strategi Pengentasan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian besar, pertama melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru (Trimo Yulianto, 2019).

Selain itu, untuk menunjang keterampilan para pelajar, perlu dilakukan sebuah Inovasi pembelajaran yang tidak hanya dilakukan di sekolah dasar dan menengah, melainkan perlu dilakukan terutama di perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan di perguruan tuntutan akan produk Pendidikan yang dikehendaki di era revolusi industri 4.0 saat ini adalah individu yang terdidik dan terlatih (Diana dan Hakim, 2020) dalam menghadapi dunia kerja. Perguruan Tinggi juga mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional yaitu pada sektor ekonomi dan Sumber Daya Manusia (SDM). Melalui peningkatan peranan dan pembangunan di bidang pendidikan di perguruan tinggi ini dapat diwujudkan sumber daya manusia sebagai subyek pembangunan nasional yang memiliki wawasan luas dan tingkat keahlian profesional yang memadai (Us'an Us'an, Katni Katni, Ustadi Hamzah, 2026). Sumber daya manusia seperti inilah yang diharapkan untuk menggali, memanfaatkan, mengembangkan dan melestarikan potensi sumber daya alam dan manusia yang ada di daerah dalam persaingan di pasar global.

Banyak usaha yang dapat dilakukan untuk kegiatan yang sifatnya pembaruan atau inovasi Pendidikan di Perguruan Tinggi, salah satunya melalui kerja sama dan kolaborasi antara perguruan Tinggi, Industri dan tentunya dengan Pemerintah. Pemerintah harus menekan perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia untuk lebih memperhatikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, kerja sama inovasi perguruan tinggi dan industri sudah menjadi keharusan saat ini. Pada titik ini pemerintah telah mengambil sikap untuk menjembatani hubungan antara perguruan tinggi dan industri guna menemukan kerangka berpikir yang sejalan sebelum membicarakan program kemitraan jangka panjang (Baharuddin, 2021). Harapannya permasalahan ini sudah terpecahkan, relasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan industri tercipta suatu harmoni dan pembangunan sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi nasional pun dapat berjalan dengan baik. Dalam melahirkan lulusan yang bermutu ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan kampus Merdeka (Meke et al., 2022).

Kampus Merdeka ini merupakan bagian dari rangkaian kebijakan Kemendikbud dengan tema payung besar Merdeka Belajar dengan Kebijakan Merdeka Belajar. Konsekuensi dari kebijakan tersebut ada beberapa hal yang harus benar-benar dilihat, direncanakan dan diimplementasikan oleh perguruan tinggi yaitu: (1) kebijakan kurikulum (dalam kampus, e-learning dan luar kampus), (2) kebijakan administrasi kurikulum (antar dan lintas prodi, fakultas, perguruan tinggi dalam dan luar negeri), (3) kebijakan penganggaran - kerja sama dan tindak lanjut kerja sama, (4) kebijakan kerja sama antar dan lintas prodi, fakultas,

perguruan tinggi, (5) kebijakan kerja sama antar dan lintas dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja, (6) kebijakan kerja sama antar dan lintas negara (Diana & Hakim, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengangguran merupakan permasalahan serius dan kompleks yang berkaitan dengan ketimpangan pertumbuhan ekonomi, persebaran penduduk, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Tingginya angka pengangguran ini, khususnya pada kelompok usia muda, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Pengangguran menjadi faktor utama penyebab terjadinya kemiskinan, yang selanjutnya kemiskinan akan memunculkan berbagai persoalan sosial seperti kriminalitas, rendahnya tingkat kesehatan, putus sekolah, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat. Kemiskinan di Indonesia bersifat multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendidikan, tetapi juga oleh rendahnya upah, terbatasnya lapangan kerja, ketimpangan distribusi pendapatan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran ini tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan kebijakan yang terintegrasi, dan berkelanjutan. Pemerintah memiliki peran penting melalui penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan usaha kecil, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan juga pemerintah.

REFERENSI

- Adisty Wismani Putri, Budhi Wibhawa, A. S. G. (2015). Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia (Pengetahuan, Dan Keterbukaan Masyarakat Terhadap Gangguan Kesehatan Mental). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 2, No, 252*. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13535>
- Anwar Sanusi, Fadillah Putra, M. F. S. R., La Ode Machdani Afala, L. A., Genta Mahardika Rozalina, D. P. R., & Muhyiddin, I. A. (2024). *NEGARA DAN KETENAGAKERJAAN: Kritik terhadap Kebijakan Ketenagakerjaan di Indonesia dalam Penerapan Kebijakan Pasar Kerja Aktif*. Penerbit Madza Media.
- Asep Fikri Nur Arif, & Nurwati, N. (2022). Pengaruh Konsentrasi Penduduk Indonesia Di Pulau Jawa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial "Humanitas" Fisip Unpas, Volume IV, 54–70*. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.23969/humanitas.v4i1.3920>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2025 turun menjadi 8,47 persen*. di akses 16 Januari 2025 di laman <https://www.bps.go.id>
- Baharuddin, M. R. (2021). Adaptasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Fokus:ModelMBKM Program Studi). *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran, Vol.4, No., 199*. <https://doi.org/https://doi.org/10.30605/jsgp.4.1.2021.591>
- Diah Kumala Sari, Diana Febiola Simatupang, Juleha Dwi Ayu Andini, Keisya Amira Zaini, Putri Namira Nugroho, M. Y. (2025). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Provinsi Sumatera Utara. *Jiic: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA, Vol : 2 No, 18969*. <https://doi.org/https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>
- Diana, & Hakim, L. (2020). Strategi Kolaborasi Antara Perguruan Tinggi, Industri dan Pemerintah : Tinjauan Konseptual Dalam Upaya Meningkatkan Inovasi Pendidikan dan Kreatifitas Pembelajaran di Perguruan Tinggi. *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (KNEMA), 2*.
- Hikmah, Lisa Quraisy, Hidayah, J. A. (2016). Kemiskinan dan Putus Sekolah. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Volume IV, 165*.
- Idris, M. (2025). *Ada 53.000 Orang Jadi Korban PHK Januari-September 2024, Jateng Terbanyak*. diakses 13 Januari 2025 di laman <https://money.kompas.com>

- Ilahi, M. T. (2014). *Gagalnya Pendidikan Karakter: Analisis dan Solusi Pengendalian Karakter Emas Anak Dididk*. AR-RUZZ Media.
- Lisa Marini, & Putri, N. T. (2019). Peluang Terjadinya Pengangguran Di Provinsi Bengkulu : Seberapa Besar? *CONVERGENCE: THE JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT*, Vol 1 No 1, 75.
- Meke, K. D. P., Astro, R. B., & Daud, M. H. (2022). Dampak Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, Vol 4 No 1, 676. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1940>
- Moh. Arif Novriansyah. (2018). Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo. *Gorontalo Development Review*, Vol 1 No 1, 60.
- Ramlawati, H. (2022). Efektivitas Program Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Buol. *Jurnal Actual Organization Of Economy (JAGO-E)*, Volume: 03, 336.
- Riska Gustiana, Taufik Hidayat, F. A. (2022). Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Suatu Kajian Literatur Review Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia). *JEMSI: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Volume 3, 658. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i6>
- Suyanto, B. (2018). *Kemiskinan, Kelaparan, dan Kematian di Daerah Terpencil Baca artikel detiknews, "Kemiskinan, Kelaparan, dan Kematian di Daerah Terpencil" selengkapnya dikaes 14 Januari 2025 di laman*<https://news.detik.com>
- Tri Widayati. (2021). *Bonus Demografi Sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi*. Insania.
- Trimo Yulianto. (2019). *Memahami Kembali Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia sebagai Sumber Penerimaan Negara*. diakses 14 Januari 2025 di laman <https://djpb.kemenkeu.go.id>
- Us'a, Jenjang Waldiono, M. (2025). Model Pendidikan Agama Bagi Anak Sesuai Tahap Perkembangannya: Perspektif Al-Qur'an dan Psikologi Islam. *Jurnal Pendidikan AURA (Anak Usia Raudhatul Atfhal)*, Vol. 6 No., 182–194. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.37216/aura.v6i2.2965>
- Us'an Us'an, Dandy Yusuf Alfasyah, F. A. (2026). Pendidikan Karakter sebagai Fondasi Pencegahan Anak Berurusan Hukum: Pendekatan Edukatif dan Preventif. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 3, 243–251. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.18193551>
- Us'an Us'an, Katni Katni, Ustadi Hamzah, A. Q. M. (2026). Kiprah Muhammadiyah Dalam Mewujudkan Generasi Emas 2045 dan Pendidikan Karakter Sejak Dini Melalui Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Volume 4Nu, 3640. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3694>
- Yayuk Sugiarti. (2014). Kemiskinan Sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan. *Jurnal JUNDELA HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIJA.*, Volume 1 N, 6.
- Yuwarman Mansur. (2024). Analisis Perkembangan Penduduk Miskin, Karakteristik Kemiskinan dan Kedalaman Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi (EMT) KITA*, VOL 8 NO 1, 18–31. <https://doi.org/DOI:10.35870/emt.v8i1.1930>